

KERAWANAN PANGAN DAN PERSOALAN YANG MELINGKUPI: KASUS KABUPATEN DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT¹

Yusup Napiri Maguantara²

Abstract

The study we carried out started from the need for improving the people's food system in Dompu Regency. The discourse has long been thrown by NGOs, government, peasant groups, and even starvation has long become news in Dompu. The passage is going to reveal that the relation between the physical nature condition and the social structure surrounding a community should be paid attention in order to comprehend the potency of food criticality, as the overcoming reference at once. The data and information used in this passage were taken from the research carried out by the studying team of Food Storage of Dompu regency from April—August 2005.

Pendahuluan

Latar dan Tujuan

Sederet persoalan yang dihadapi petani produsen pangan muncul dalam sebuah lokakarya mengenai sistem

pangan di Kabupaten Dompu—mulai dari rendahnya harga pada saat panen hingga kesulitan mengolah tanah pada musim kemarau dan tidak merata penguasaan tanah pertanian. Kemunculan persoalan-persoalan tersebut, dan terdapatnya laporan kela-

¹ Tulisan ini merupakan bagian dari Laporan Studi Pembentukan Lumbung Pangan Daerah Kabupaten Dompu yang akan beredar dalam lingkup yang terbatas. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh tim studi, terutama untuk Dede Mulyanto (staf peneliti AKATIGA), Wawuk Kristian Wijaya, dan Dedi Kurniawan (Staf peneliti KRKP) yang turut serta dalam proses studi lapang dan penulisan laporannya. Namun demikian, keseluruhan isi dari tulisan ini menjadi tanggung jawab penulis.

² Staf peneliti AKATIGA.

paran dan kekurangan gizi di Kabupaten Dompu³, jelas merupakan indikasi kerawanan pangan di kabupaten itu. Indikasi ini patut diwaspadai, walaupun jika merujuk pada neraca produksi-konsumsi beras tahun 2004 Kabupaten Dompu surplus sekitar 23.500 ton.⁴

Jelas, kelaparan sebagian penduduk bukan karena Kabupaten Dompu tidak menghasilkan surplus hasil tani. Terlebih dengan program bantuan beras murah berjumlah ribuan ton juga turun dari pemerintah pusat. Singkatnya, kerawanan pangan bukan persoalan alamiah semata, melainkan telah terjadi kerusakan sistem jaminan pangan dan pengaturannya.

Fenomena kerawanan pangan tersebut menggugah pihak-pihak tertentu untuk berupaya melenyapkannya, entah terdorong oleh keibaan manusiawi, panggilan ideologis, ataupun oleh kepentingan politik untuk mengikis rakyat lapar yang sering "mengganggu penampilan" di forum antar-bangsa. Sulit kita mengelak dari kenyataan bahwa ketakterjaminan pa-

ngan berakar pada kemiskinan. Namun, kemiskinan itu sendiri tumbuh dari tanah yang dipenuhi unsur-unsur beraneka ragam yang terjalin secara rumit. Persenyawaan unsur-unsur yang rumit tersebut sering membuat pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah ini putus asa dan memilih cara-cara serampangan dengan tujuan "asal ada program".

Dalam tulisan ini, saya akan mengungkapkan bahwa pertalian antara kondisi fisik alam dan struktur sosial yang melingkupi sebuah komunitas patut diperhatikan dalam upaya memahami potensi kerawanan pangan, sekaligus sebagai acuan penanganannya. Sejumlah data dan informasi yang digunakan dalam tulisan ini diambil dari penelitian yang dilakukan tim kaji Lumbung Pangan Kabupaten Dompu pada rentang April—Agustus 2005. Tim kaji lumbung ini merupakan kolaborasi tiga lembaga, yaitu Tim 15 Kabupaten Dompu⁵, KRKP⁶, dan AKATIGA⁷, dengan dukungan dari Pemda Kabupaten Dompu dan Veco-RI⁸.

3 Lihat Harian Kompas 11 Juli 2005 halaman 38 dan hasil survai lapang gizi buruk dan indikasi rawan pangan Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh FORSIP-PS dan PWI Dompu tahun 2005.

4 Laporan Dinas Pertanian Kabupaten Dompu 2005

5 Tim 15 terdiri dari unsur petani, organisasi Petani Dompu, LSM, pemerintah, DPRD dan Promis GTZ.

6 Koalisi Rakyat untuk Keadaulatan Pangan, sebuah perkumpulan LSM dan individu yang menggagas keadulatan rakyat atas pangan, di Bogor.

7 Sebuah LSM Pusat Kajian Masalah-masalah Sosial di Bandung.

8 Lembaga donor yang memperhatikan masalah petani dan pertanian di Denpasar.

Cara Pandang Kerawanan Pangan

Secara sederhana, terdapat dua pendekatan dalam menjelaskan sebab-musabab kerawanan pangan yang tentunya mempengaruhi pendekatan terhadap penyelesaiannya juga, yaitu pendekatan sosial-politik dan pendekatan lingkungan fisik.

Pendekatan sosial-politik memandang kerawanan pangan muncul dalam kemiskinan yang berakar dalam hubungan-hubungan sosial tak adil. Kemiskinan merupakan akibat dari proses pemusatan kekayaan (dominasi atas barang) dan kekuasaan (dominasi atas orang) pada segelintir pihak. Pemusatan kekayaan dan kekuasaan ini terjadi pada tiga tingkatan. Pada tingkat *internasional*, negara-negara kaya menjadikan negara miskin tetap miskin lewat penjajahan atau ikatan merugikan, dan pada saat yang sama memperoleh keuntungan dari penanaman modal dan pengembalian keuntungan. Di tingkat *nasional*, negara-negara miskin mendahulukan kepentingan golongan menengah perkotaan di atas kepentingan golongan miskin pedesaan melalui pergeseran nilai tukar perdagangan antara desa dan kota serta melalui investasi di bidang industri dan jasa. Pangan diatur agar murah untuk warga kota, tetapi barang-barang

lainnya, terutama kebutuhan petani seperti pupuk dan bibit, mahal. Di tingkat *pedesaan*, elite setempat (tuan tanah, tengkulak, rentenir, dan pamong desa) menumpuk kekayaan dan kekuasaan. Perubahan sosial-ekonomi biasanya menguntungkan golongan-golongan elite ini.

Bagi pendekatan ini, teknologi dan komersialisasi memainkan peran dalam pemiskinan. Komersialisasi menyebabkan produk-produk kota membanjiri desa-desa dan mematikan usaha di desa. Teknologi padat-modal menghancurkan kehidupan buruh dan pekerja. Keduanya bersifat memusatkan kekayaan dan kekuasaan di tangan orang kaya dan menjadikan mereka kian kaya dengan mendapat hasil pertanian lebih banyak atau memperbesar dagangannya. Ikatan antara orang kaya di kota dan di desa diperkuat. Ikatan ini oleh Breman dan Wiradi (2004) disebut *patronase sipil*. Kedudukan orang kaya diperkukuh lewat persekutuan dengan pemuka politik, pemerintah, dan elit desa. Hasilnya, orang miskin semakin sengsara, lemah, dan tersisih. Semua pengambilan keputusan yang berkenaan dengan lingkungan tinggal berada di tangan orang-orang yang percaya diri, yaitu orang kaya dan berpendidikan. Hal ini diperparah oleh keberpihakan sebagian pemuka

agama, pegiat LSM, dan peneliti pada golongan elite, karena bagaimanapun, mereka berasal dari golongan elite juga (Chamber 1983).

Pandangan ini tentu saja mendapat tantangan dari mereka yang mende-kati masalah dari segi tampilan fisik tempat masalah terjadi. Pendekatan yang menantang ini boleh disebut dengan pendekatan lingkungan fisik. Pendekatan ini melihat akar masalah kerawanan pangan pada tekanan kependudukan dan tekanan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Lebih banyak manusia, lebih besar kerusakan yang dilakukannya terhadap lingkungan hidupnya dan, karenanya, dari generasi ke generasi mereka tetap (atau kian) miskin. Faktor-faktor fisik seperti kuman penyakit, lingkungan yang kotor, bahkan pemukiman yang tidak memadai juga dianggap sebab sekaligus akibat dalam lingkaran kemiskinan yang di tengah-tengahnya kerawanan pangan tinggal.

Selain itu, pendekatan ini juga melihat faktor cuaca dan iklim sebagai sumber masalah. Iklim kering membatasi tanaman pertanian tertentu untuk menghasilkan panen yang lebih banyak. Kekeringan, banjir, atau wabah hama juga berperan dalam masalah kemiskinan dan kerawanan

pangan. Semua faktor alam tersebut tentu tidak bisa begitu saja diabaikan. Bagaimanapun, kerawanan pangan lebih sering muncul di daerah yang rentan bencana alam.

Kedua pendekatan di atas tidak seluruhnya keliru. Sebagian faktor kerawanan pangan memang mendekam di arena sosial-politik. Struktur sosial dan moda produksi yang menghalalkan eksploitasi segelintir orang atas sebagian besar orang juga menghasilkan segolongan orang terpinggir yang susah payah mencapai keterjaminan pangan sepanjang tahun. Sebagian faktor lain sangat mungkin berada di lingkungan fisik alam.

Konteks Alam dan Sosial Kerawanan Pangan di Kabupaten Dompu

Sejarah Ekologi dan Demografi

Kabupaten Dompu merupakan salah satu kabupaten di Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa sendiri adalah pulau seluas 13 ribu kilometer persegi yang secara topografis merupakan daerah berbukit-bukit. Rangkaian perbukitan memanjang dari barat ke timur dengan titik tertinggi pada puncak Gunung Tambora (2.821 m dpl).

Sejarah ekologi Pulau Sumbawa, menurut tipologi Geertz (1983), termasuk ke dalam ekologi "Indonesia Luar", yang didominasi lahan kering dan perladangan. Tidak seperti ekologi sawah yang berlaku di Jawa, ekologi ladang memang sulit untuk menampung penduduk padat karena surplus hasil pertaniannya yang tidak bisa menghidupi banyak orang. Bukit-bukit berbatu dan tanah-tanah kering yang tidak bisa ditumbuhi tanaman pangan merupakan lanskap umum sepanjang pulau. Kian ke timur iklim semakin kering. Sebagai contoh, 64 persen tanah di Kabupaten Dompu, secara umum, merupakan hutan tropis kering yang menyelimuti rangkaian perbukitannya. 23 persen lahan merupakan ladang kering, dan hanya 11 persen yang tercatat merupakan sawah. Satu bagian dari Kabupaten Dompu, yaitu Kecamatan Kilo bahkan hanya 442 hektar saja yang merupakan sawah sedangkan lahan keringnya 23 ribu hektar.

Penghuni prasejarah pulau Sumbawa secara umum bisa digolongkan menjadi dua. Berdasarkan analisis bahasa yang digunakan, penduduk Pulau Sumbawa bagian barat (Sumbawa) tergolong ke dalam Melayu-Polinesia Barat; dan penduduk bagian timur (Dompu, Bima) tergolong ke dalam

kelompok bangsa Melayu-Polinesia Tengah (Parimmartha 2002:35).

Letusan gunung Tambora pada tahun 1815 adalah peristiwa penting dalam sejarah Pulau Sumbawa, pada umumnya. Letusan tersebut menelan korban 11.000 orang tewas dan 37.825 orang meninggal dunia karena kelaparan yang mengikuti bencana tersebut. Selain itu tercatat 36.275 orang meninggalkan pulau mengungsi ke pulau lain. Kerajaan Dompu lenyap dan menyisakan sekitar 2.000—3.000 orang penduduk yang kehilangan kerajaan (Chamber-Loir 1985, Parimmartha 2002:115—119). Jadi, sebelum ledakan Tambora, Dompu dihuni oleh sekitar 10.000—11.000 orang dan setelah ledakan tinggal 2000—3000 jiwa saja. Suatu penurunan demografik yang pasti mengubah banyak sekali segi kehidupan mereka. Saat sekarang, kepadatan penduduk Dompu bisa dikatakan tidak padat, hanya 144 hingga 200 jiwa/km persegi dibandingkan dengan Jawa yang mencapai 2.000 jiwa/km persegi.

Masyarakat pedesaan Dompu merupakan kelanjutan masyarakat peladang berpindah yang pernah mengenyam keberadaan kerajaan sebagai pemegang kendali politik di tingkat

supra-kampung. Dengan hancurnya Kerajaan Dompu, maka tidak ada lagi otoritas suprakampung yang berperan dalam menegakkan norma aturan bersama dalam cakupan luas. Selain itu, banyaknya lahan kosong karena ditinggal pemilik, baik mati karena bencana Tambora maupun mengungsi ke luar pulau, memungkinkan sistem peladangan berpindah kembali dijalankan. Orang Dompu kembali ke masyarakat peladang berpindah. Mungkin sampai kekuasaan kolonial kembali menguasai di awal abad ke-20.

Sarana dan Prasarana Desa

Jalan lintas pulau yang berkelok-kelok di sepanjang pesisir utara menghubungkan kota pelabuhan Bima dan Sumbawa Besar. Setiap hari bus-bus angkutan umum mengangkut penduduk pulau kering ini dari satu kota ke kota lainnya. Jalan lintas yang menghubungkan kota kabupaten dengan wilayah-wilayah pedesaannya merupakan sarana sejak dekade 1990-an dan dimanfaatkan pemilik modal sebagai transportasi darat. Bus-bus kecil dan truk hilir-mudik mengantar orang dan barang dari desa ke kota dan sebaliknya. Dua atau tiga tahun lalu jasa angkutan sepeda motor, ojek, mulai mengisi kekurangan angkutan bis untuk rute-rute jarak dekat. Lima tahun mendatang pe-

luang meningkatnya orang yang menjadi pengemudi ojek cukup tinggi.

Berkenaan dengan air, ada beberapa sumber air untuk memenuhi kebutuhan penduduk pedesaan Dompu, yaitu air sungai, mata air, dan sumber air dalam. Tidak semua daerah dialiri sungai. Selain itu, pendeknya alur sungai juga menyebabkan air tidak selalu ada sepanjang tahun. Untuk keperluan rumah tangga, penduduk desa banyak memanfaatkan sumber mata air yang merupakan berkah dari rangkaian perbukitan yang relatif masih memungkinkan air tersimpan. Air dari mata air disalurkan melalui pipa-pipa langsung ke beberapa tempat. Satu tempat penyaluran dimanfaatkan oleh beberapa rumah tangga; biasanya lima hingga enam rumah. Pada bulan-bulan paling kering (Juli-Agustus-September), air sungai yang tinggal sedikit pun menjadi sumber air untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus.

Listrik sudah mencapai pedesaan Dompu sejak dekade 1980-an bersamaan dengan dibangunnya jalan-jalan lintas yang menghubungkan kota kabupaten dengan wilayah-wilayah pedesaannya. Namun demikian, tidak semua penduduk bisa mengakses listrik. Sebagai contoh, di Kecamatan Hu'u saja, hanya 30 per-

sen rumah tangga yang teraliri listrik. Di beberapa kecamatan, seperti di Kilo, sebagian penduduknya memanfaatkan listrik tenaga matahari. Namun, secara umum penduduk pedesaan Dompu masih menggunakan lampu minyak sebagai penerang di hari gelap.

Bagi penduduk dari golongan berada, keberadaan listrik tidak hanya sebagai penerang, tetapi juga sarana untuk menunjukkan kemampuan konsumsi barang-barang elektronik seperti televisi, radio-tape, atau kulkas. Simbol-simbol kemakmuran, terutama sejak revolusi hijau menguntungkan petani pemilik lahan luas, semakin bisa diterjemahkan ke dalam kepemilikan barang-barang tersebut.

Pola Pemukiman dan Perumahan

Pemukiman utama penduduk pedesaan Dompu berciri mengelompok padat di suatu wilayah pusat desa dengan kantor kepala desa sebagai titik pusatnya. Selebihnya rumah-rumah berjajar tidak teratur mengikuti jalan utama dan jalan sekunder. Hampir di semua komunitas, kecuali yang berada di dekat kota kabupaten, rumah di desa hanya salah satu unit kediaman penduduk. Satu unit lainnya adalah gubuk ladang. Karena ladang dan sawah biasanya agak terpisah dari

pemukiman, semua ladang dan sawah mempunyai gubuk yang di sana pemilik lahan atau orang suruhannya tinggal untuk beberapa waktu.

Kebiasaan memiliki dua kediaman seperti ini khas peladang berpindah yang masih dekat dengan hutan. Ikatannya pada "rumah" sangat kecil. Pendidikan tata kepatutan pun lepas dari pengawasan orangtua. Bahkan, dapat saja terjadi bahwa kasus-kasus gizi buruk muncul sebagai akibat pengawasan konsumsi untuk anak-anak terlantarkan. Waktu yang cukup lama bagi rumah tangga petani kecil untuk menunggui ladangnya memungkinkan anak-anak tumbuh tanpa kesadaran akan otoritas kuat dalam norma-norma yang dianut bersama oleh masyarakat. Hal inilah, bersama-sama dengan tingkat migrasi masuk dari Bima dan daerah lain di Nusa Tenggara, yang memungkinkan munculnya masyarakat longgar yang mendefinisikan semua hubungan sosial dalam kerangka hubungan individual dengan norma-norma penata hubungan sosial yang terbatas dan sangat lentur.

Matapencaharian

Sebagian penduduk pedesaan mengandalkan pertanian sebagai sumber pencaharian utama, entah sebagai

pemilik tanah, penggarap penyewa, atau buruh tani. Selain itu, beberapa variasi sumber nafkah ditemukan sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi ekologi wilayah, infrastruktur, pengetahuan budidaya, kekuatan sosial dan kekuatan pasar. Untuk yang berbasis sawah, budidaya padi dilakukan minimal 2 kali dalam setahun dan terkadang diselingi kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah. Sementara itu, untuk sawah tadah hujan hanya dapat satu kali ditanami padi dan/atau palawija. Komuniti yang dekat dengan hutan masih memanfaatkan tanah hutan untuk ladang berpindah, diselingi tanaman umur panjang dan perkebunan seperti jambu mete. Mata pencaharian lainnya adalah memanfaatkan hasil kayu hutan dan meramu madu. Pola yang serupa dilakukan pada tanah perbukitan kering.

Sebagian komuniti di pantai selatan memanfaatkan hasil laut. Sebagian besar nelayan di pantai selatan Dompus berasal dari Bima yang bermigrasi pada awal abad ke-20. Ada pula kampung nelayan di Kecamatan Hu'u yang penduduknya berasal dari Jawa. Hasil laut lainnya adalah rumput laut. Sebagian penduduk memiliki sapi, kuda, atau kambing sebagai hewan ternak. Tidak seperti pada masyarakat pedesaan Jawa, ternak di Dom-

pu tidak mempunyai kandang. Tidak ada kandang yang tampak di sekitar permukiman penduduk. Tidak juga ada penggembala. Tradisi "meliarkan" ternak tampaknya merupakan strategi adaptasi atas kondisi iklim yang kering. Sedikit sekali ada ladang rumput di seluruh Dompus.

Di beberapa desa, tampaknya kemiskinan merupakan potret keseharian. Kemiskinan di pedesaan Dompus menjangkiti banyak keluarga. Kegagalan panen pada musim tanam yang telah lalu mengakibatkan persediaan pangan menipis. Untuk menyambung kehidupan, sebagian penduduk yang hanya mengandalkan pertanian lebih sering berutang kepada para tengkulak atau rentenir. Meskipun tidak semua penduduk bertindak demikian, pola peminjaan uang kepada rentenir sudah menjamur di pedesaan Dompus.

Kelompok Tani

Pengamatan atas beberapa kelompok tani menunjukkan bahwa hampir semua anggota kelompok tani adalah petani pemilik tanah. Satu kelompok tani dipersatukan oleh so atau blok hamparan tanah garapan yang saling berdekatan. So merupakan organisasi sosial berdasarkan kepemilikan lahan. Dasar kepemilikan lahan di so

inilah yang tidak memungkinkan buruh tani *tunakisma* menjadi anggota kelompok. Program yang digulirkan melalui kelompok tani merupakan pelayanan kebutuhan-kebutuhan para pemilik lahan: penyediaan pupuk, bibit, pestisida, penyewaan traktor, dan pinjaman. Mekanisme ini merupakan warisan program revolusi hijau di masa Orde Baru. Penyuluh pertanian berkepentingan untuk mengelompokkan petani pemilik lahan ke dalam satuan *so*, untuk memudahkan pengorganisasian masalah irigasi dan waktu tanam. Hingga saat ini, kelompok-kelompok tani diorganisasikan berdasarkan *so*-nya.

Kelompok-kelompok tani kadangkala digunakan sebagai sarana hubungan antara elite desa dengan kekuasaan di luar desa dan meningkatkan basis kekuasaan di daerah masing-masing. Selain itu, kelompok-kelompok "partisipatif" ini juga menjadi sarana bagi elite desa untuk pengembangan dan dominasi ekonomi. Perolehan dari kedudukan sebagai ketua kelompok dapat berupa gagasan, pelatihan, informasi, dan akses politik yang bisa lebih meningkatkan kemakmuran rumah tangga dan kedudukan politik mereka di desa. Daftar-daftar mengesankan dari jumlah anggota kelompok dan penghargaan atas beberapa keberhasilan disimpan untuk sesekali

dipertontonkan kepada pengunjung, baik dari kantor pemerintah, lembaga penelitian, maupun LSM yang sedang mengadakan evaluasi program. Karena tiga pihak ini jarang sekali menyelidik lebih dari yang terpajang, persoalan mendasar yang menghinggapi penduduk desa, terutama golongan miskin, terbenam dalam kabut buram pertunjukan-pertunjukan ini.

Pengendalian sosial kelompok tani yang lemah dilihat dari beberapa segi. Secara formal, dalam kasus-kasus proyek pinjaman, pengendalian pengembalian dana tidak baik. Petugas tidak secara aktif dan tidak secara terus-menerus menjalankan tugasnya. Selain itu, dan ini yang penting, adalah pengendalian sosial informal oleh anggota kelompok tani sendiri. Ketua kelompok tidak mampu menegur dan menekan anggotanya untuk mengembalikan pinjaman. Pengelompokan petani berdasarkan *so* juga menyulitkan mekanisme pengendalian sosial secara informal antar-anggota. Hal ini terjadi karena kedekatan di suatu *so* belum tentu juga diiringi dengan kedekatan kediaman. Untuk penanganan teknis pertanian, mungkin pengorganisasian berdasarkan *so* bisa berguna.

Dinamika Sosial-Ekonomi Pangan di Pedesaan Dompu

Desa Di Antara Kelimpahan dan Kekurangan

Menurut keterangan informan, pada awalnya masyarakat Dompu-Bima merupakan kesatuan yang dipimpin oleh 5 Ncuhi⁹. Selain sebagai pelindung, dengan kekuatannya seorang Ncuhi mampu menciptakan kemakmuran sehingga dipercaya dan dihormati rakyatnya. Sepenggal kisah tentang suatu masa kelimpahan di masa lalu melekat dan berkembang di masyarakat sebagai cerita rakyat tentang Ncuhi Daha. Kesaktian Ncuhi memungkinkan semua kelimpahan padi tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya, tetapi juga dianggap berlebih. Berikut petikan wawancara dengan salah satu informan:

Hanya dengan delapan petak yang keseluruhannya tidak mencapai satu hektar, penduduk mengalami masa kemakmuran yang panjang. Hal ini terjadi karena kesaktian Ncuhi. Penduduk hanya sekali saja menanam padi dan panen terus menerus dituai. Karena kebosanan sebagian penduduk karena kerjanya hanya panen dan panen saja setiap waktu, huma-huma itu dibakar. Setelah itu, penduduk harus selalu menanam untuk satu kali

panen dan memenuhi kebutuhan pangan.

Mitos kelimpahan itu masih diyakini oleh sebagian orang Desa Daha saat ini. Konon jika kita mengunjungi tempat yang dulunya Ncuhi Daha dan keturunannya pertama kali membuka wilayah yang sekarang menjadi Desa Daha, dan kita sedang beruntung, maka kita bisa menemukan hasil bumi yang di luar kebiasaan. Jika kita menemukan pohon pisang, maka buah pisangnya itu biasanya besar-besar dan enak-enak.

Mitos serupa juga muncul bersama revolusi hijau. Tujuan agung Orde Baru untuk menghantar bangsa menuju kemakmuran dan keadilan telah mengubah lahan-lahan menjadi "pabrik" yang menghasilkan berton-ton hasil tani lewat revolusi cara dan teknik produksi. Pada tahun 2004, sebagai contoh, Kabupaten Dompu mencatat surplus padi sebesar 23.500 ton. Para pejuang revolusi, yaitu insinyur-insinyur terlatih dari berbagai perguruan tinggi, bekerja membanting tulang membangkitkan petani dari kekurangan pangan di masa sebelumnya. Perjuangan mereka masih berlanjut hingga kini, termasuk oleh pegiat LSM yang menyalurkan pinjaman ringan dan bimbingan teknis

⁹ Ncuhi adalah sebutan atau gelar pemimpin, *chief*, atau *datu*, yang memimpin sekelompok orang di suatu pemukiman masa pramodern di daerah kebudayaan Dompu-Bima.

menuju kemajuan yang memakmurkan. Namun, berbeda dengan masa kelimpahan di zaman Ncuhi Daha, kelimpahan masa revolusi hijau hingga saat ini tidak diiringi kelimpahan sarana produksi bagi semua orang. Lahan-lahan tidak terbagi secara merata. Orang-orang kaya pemilik lahan luas tidak hanya menikmati kelimpahan lahan, tetapi juga kelimpahan bantuan pinjaman, teknik-teknik baru eksploitasi lahan, teknologi pertanian, informasi inovasi, dan jaringan pasar penghasil uang tunai. Persahabatan erat petani kaya dan elit-elit desa lainnya dengan orang kaya dan orang berkuasa yang datang dari kota Dompu membuat semua kelimpahan ini berfungsi dengan baik. Tidak demikian halnya bagi kaum miskin. Beberapa bantuan yang mereka terima lebih dimanfaatkan sebagai "tambal-sulam" pemenuhan kebutuhan hidup. Kelangkaan daya dukung sosial memperlemah kemampuan membangkitkan nilai tambah dan menikmati kelimpahan yang terjadi.

Semua pihak yang berkepentingan dengan kemakmuran desa di Kabupaten Dompu tampak seperti "Bapak" yang memperhatikan semua "anak-anaknya". "Anak-anak" yang kaya dibantu mengolah lahan seproduktif

mungkin. "Anak" yang miskin diberi bantuan beras murah di kala *paceklik*. Masyarakat, sadar atau tidak, telah "membakar" ladang-ladang mereka seperti yang dulu dilakukan pengikut Ncuhi Daha. Ikatan patronase setempat yang memungkinkan orang miskin terjamin secara sosial-ekonomi terhadap akses ke sumber-sumber pendapatan mulai ditinggalkan. Patronase tidak lagi terjalin antara orang kaya di desa dengan orang miskin tetangga mereka, tetapi antara orang kaya desa dengan pejabat, pedagang hasil tani, dan politikus dari kota. Orang kaya tidak lagi merasa perlu membantu tetangganya yang miskin, *toh* kini orang miskin bisa mencari kerja nonpertanian ke kota-kota. Kalau pun tidak mendapatkan kerja, pemerintah akan menanganinya.

Kepekaan akan krisis hilang dalam kesadaran bersama. Semua dinding penutup telah dibuka. Tidak perlu sehari-semalam berkuda untuk mengabarkan sesuatu ke ibukota kabupaten. Jalan aspal dan kendaraan bermotor sebagai buah pembangunan menjalankan tugasnya dengan baik. Pemerintah menempatkan pejuang-pejuang pembangunan hingga ke pelosok. Informasi apapun tentang kekurangan dan bencana akan dengan segera menurunkan bantuan-

bantuan. Bapak selalu memerhatikan anak-anaknya.

Keterbukaan Ekonomi Desa dan Keragaman Sumber Nafkah

Desa-desanya di Dompu mengalami perubahan, terutama sejak awal abad ke-20. Perubahan pertama yang teridentifikasi adalah kehidupan ekonomi desa di Dompu yang semakin terbuka dengan melemahnya peran tanah sebagai sumber nafkah penduduk. Sumber-sumber nafkah bukan-pertanian seperti perdagangan, buruh industri, dan jasa berkembang semakin kuat. Karena desa tidak bisa memberikan semua sumber tersebut, tingkat migrasi penduduk desa tinggi. Kedudukan tanah dalam kehidupan sosial ekonominya sebenarnya agak berbeda dari satu desa dengan desa kasus lainnya. Di Dompu, kepemilikan tanah masih berperan penting sebagai sumber nafkah, sumber pengumpulan kekayaan, dan gengsi sosial. Namun, terjadi proses pemusatan kepemilikan tanah di tangan segelintir orang yang termasuk golongan kaya yang relatif tinggi. Pemusatan ini dapat terjadi karena berkembangnya sistem ijon dan rentenir yang membayangi petani miskin. Karena tidak sepanjang waktu tanah-tanah pertanian membuahkan hasil, maka ketika gagal pa-

nen atau gagal tanam terjadi, pilihan satu-satunya petani miskin adalah dengan berutang kepada rentenir untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga tanah bisa ditanami kembali. Kebutuhan tinggi akan uang tunai karena berubahnya pola konsumsi juga meningkatkan ketergantungan petani miskin akan asupan uang tunai sepanjang tahun. Keterdesakan kebutuhan uang tunai, misalnya ketika anggota keluarga sakit atau anak yang beranjak ke usia sekolah, mempermudah sistem ijon dijalankan. Bila petani miskin tidak bisa melunasi utangnya, tanahnya dapat diambil sebagai pembayaran. Pemusatan kepemilikan tanah pada segelintir orang kaya tampak dari banyaknya anggota rumah tangga buruh tani tanpa tanah terdesak untuk mencari nafkah ke luar desa, terutama ke kota-kota besar seperti Surabaya, Denpasar, atau Makasar. Pilihan atas ketiga kota yang paling dituju tersebut menunjukkan bahwa orientasi migrasi keluar penduduk adalah ekonomi. Kota-kota tersebut jelas tidak sekadar simbol pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tempat nyata yang menyediakan beragam sumber nafkah, bahkan untuk orang desa berpendidikan rendah.

Dari Desa Daha misalnya, ditemukan bahwa petani miskin meninggalkan desa untuk menjadi buruh bangunan,

tukang becak, tukang kayu, atau pedagang ke Makasar, Surabaya, dan kota sekitarnya. Tekanan kependudukan dan desakan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga telah mengantar sebagian penduduk beranjak dari desa ke kota untuk mencari nafkah. Basis kepemilikan tanah tidak berarti lagi untuk sebagian besar penduduk. Internasionalisasi buruh, meminjam istilah Breman dan Wiradi (2004), pun terjadi yang tampak dari meningkatnya jumlah penduduk yang menjadi TKI ke Timur Tengah atau Malaysia.

Selain migrasi, perdagangan kecil menjadi salah satu sumber nafkah yang kian banyak dipilih penduduk desa yang tersingkir dari pertanian. Kecenderungan ini lebih tampak pada kalangan kaya dan menengah yang masih mempunyai cadangan ekonomi rumah tangga. Dari kalangan keluarga kaya, orientasi sumber pengumpulan kekayaan sudah mulai beralih dari tanah ke modal. Penanaman modal dalam kegiatan wirausaha bengkel dan toko onderdil, jasa perantara, usaha penangkaran rumput laut dan distribusinya, serta investasi alat transportasi merupakan pilihan yang umum. Investasi ke sektor pendidikan untuk keturunan juga menguat di kalangan keluarga kaya di ke-

camatan. Orientasi investasi pendidikan adalah kota Mataram dan Makassar. Sedikit yang menjangkau Jawa selain Yogyakarta, dan itu pun dari kalangan penduduk kaya yang mengirim anaknya untuk sekolah.

Keterbukaan ekonomi desa dan kian beragamnya sumber nafkah memang telah mengikis kemiskinan absolut di pedesaan Dompu. Sumber-sumber nafkah tidak lagi terkunci dalam tanah pertanian. Golongan miskin tidak lagi terpenjara dalam struktur timpang kepemilikan tanah yang secara tradisional menjadi ukuran derajat kemiskinan. Saluran-saluran bukan-tanah memungkinkan penduduk tanpa tanah mengusahakan pendapatan dan mengisi cadangan keuangan rumah-tangga, dan bagi yang berhasil, bisa "naik kelas" melalui kerja upahan atau perdagangan di kota. Kemajuan-kemajuan ekonomi desa yang kian terbuka dirasakan baik oleh golongan kaya maupun golongan miskin meskipun dengan derajat keuntungan yang berbeda. Golongan kaya memperoleh lebih banyak dari perkembangan ini sehingga menjadi golongan yang mampu memperluas modal ekonomi rumah tangganya ke modal-modal lainnya seperti sekolah, jaringan politik, dan organisasi. Namun, seperti terbukanya "kotak pandora", segala keuntungan dari keterbukaan

ekonomi desa juga membawa serta kesenjangan yang semakin tajam antara lapisan kaya dan lapisan miskin. Akumulasi kekayaan merupakan ciri dari lapisan kaya desa, sedangkan lapisan miskin masih bergulat untuk bertahan hidup. Pendidikan yang diharapkan menjadi sarana peningkatan modal kultural lapisan miskin ternyata kian hari kian sulit dimasuki orang miskin desa. Sementara itu, pemassalan pendidikan yang menjadi praktik kebijakan pemerintah Orde Baru telah mendevaluasi nilai ijazah. Menyempitnya sumber nafkah pertanian dan kebutuhan akan ijazah untuk memasuki sektor formal semakin meminggirkan rumah tangga miskin yang terpaksa memangkas alokasi konsumsi pendidikannya. Selain menjadikan kemiskinan menjadi tidak absolut lagi, keterbukaan ekonomi desa juga membuat kesenjangan antarlapisan ekonomi melebar.

Jalan dan listrik meningkatkan mobilitas orang desa ke kota dan orang kota ke desa. Barang-barang konsumsi baru—seperti televisi dan sepeda motor—menjadi kebutuhan sosial yang mau tidak mau harus dipenuhi. Lumbung lenyap dalam ekonomi desa. Padi ladang juga menjadi barang dagangan. Kebutuhan uang tunai meningkat untuk konsumsi pupuk, bibit,

upah kerja, barang elektronik, motor, dan beras.

Keterbukaan Politik dan Penge-lompokan Masyarakat

Revolusi yang diembuskan rezim Orde Baru telah berhasil merambah desa-desa dan menutup saluran-saluran politiknya. Semuanya itu telah mengubah masyarakat desa secara radikal. Reformasi belum mengubah apa-apa selain banyaknya partai dan mudahnya akses lembaga donor internasional masuk desa. Reformasi politik nasional belum bisa mencabut akar derita kaum miskin desa. Struktur sosial pedesaan yang tidak lagi berpihak pada orang miskin masih akan tetap seperti ini di masa depan.

Pengelompokan masyarakat ke dalam satuan administratif desa ternyata tidak efektif. Karena latar sejarahnya, desa-desa di Dompus dihuni oleh penduduk dari beragam latar belakang. Orang-orang dari kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat masuk. Di beberapa desa, sebagian warganya adalah penduduk transmigran dari Bali dan Jawa. Penduduk migran ini tidak menyatu sepenuhnya dengan penduduk asal Dompus. Penduduk pendatang beradaptasi dengan budaya setempat hanya lewat bahasa. Permukiman mereka tetap terpisah. Oleh karena

itu, ketegasan perbedaan identitas bisa dipertahankan. Dapat dikatakan bahwa pengelompokan dalam masyarakat beragam latar belakang dan energi pemersatunya. Ikatan primordial berupa asal-usul suku bangsa bukan soal sepele dan dapat menjadi sumber potensial konflik kepentingan.

Perubahan sosial di pedesaan Dompu, paling tidak dari enam desa kasus, antara lain dapat dilihat dari perkembangan lembaga-lembaga sosial setempat yang digerakkan oleh LSM. Jika dianalisis dengan terminologi modal sosial, tiap-tiap lembaga yang bertumbuh kembang itu menunjukkan upaya pemeliharaan ikatan antaranggota di dalam kelompoknya sendiri (*bonding*) dengan kurang baik. Terlihat bahwa sumber-sumber dukungan bagi kegiatan mereka terlalu banyak datang dari luar, baik berupa pendatang simpatisan maupun dari lembaga lain yang menyumbangkan gagasan maupun jasa dan barang bagi mereka. Barangkali hubungan yang baik dengan pihak luar (*linking*) ini menyebabkan lembaga-lembaga itu dapat hidup dan bergerak secara relatif mandiri di dalam desa, tidak terlalu tergantung kepada lembaga lain yang ada di desa. Oleh karena itu, di antara mereka sendiri, hubungan yang bersifat menjembatani

hubungan antarlembaga (*bridging*), lemah sekali kalau bukan tidak ada. Keadaan ini menimbulkan kesan bahwa lembaga-lembaga sosial hidup berdampingan, tetapi tidak berhubungan. Persis gambaran tentang suatu masyarakat majemuk yang golongan-golongan konstituennya dapat memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Seperti model masyarakat majemuk pula, fungsi desa bagi lembaga-lembaga itu sekadar sebagai salah satu sumber legitimasi keberadaan mereka.

Kemajuan ekonomi pada tingkat desa menunjukkan kemakmuran. Banyak orang dapat bersekolah bahkan hingga ke Jawa dan Sulawesi. Banyak orang mempunyai kendaraan bermotor. Jalan-jalan desa sudah masuk hingga pelosok. Pembangunan menuntut lebih banyak kemakmuran, tetapi menuntut lebih sedikit hubungan-hubungan sosial (Antlöv 2002: 135). Hal ini terjadi di desa-desa penelitian. Namun, kemakmuran yang meningkat lebih banyak dinikmati lapisan kaya desa, dan lebih sedikitnya hubungan sosial lebih menimpa lapisan miskin. Lembaga-lembaga sosial yang berkembang di pedesaan, entah berlatar kesamaan keagamaan ataupun politik, bersifat tertutup. Kelompok-kelompok ini menyediakan ikatan persaudaraan semu. Hanya mereka

yang lahir dari keluarga yang sejak lama berada dalam kelompok dapat menjadi saudara. Bagi anggota kelompok, lembaga-lembaga ini memberikan saluran-saluran yang meningkatkan modal sosialnya dan mengantarnya ke luar dari desa. Modal ini kemudian bisa dikembangkan menjadi sarana peningkatan ekonomi. Akan tetapi, sekali lagi, lembaga-lembaga ini tidak seterbuka ekonomi desa. Tidak semua orang desa bisa mengikatkan diri ke dalam kelompok-kelompok ini. Kuatnya kecenderungan ikatan-dalam-kelompok masyarakat, terutama yang berorientasi aliran keagamaan, menunjukkan pula kuatnya eksklusivitas dan inklusi. Korban dari keadaan ini tentunya adalah mereka yang berada di pinggiran aktivitas masyarakat, baik dalam ekonomi, politik, maupun kultural. Pembukaan ekonomi desa tidak hanya memunculkan sumber-sumber nafkah baru, tetapi juga menata ulang kelompok-kelompok masyarakat.

Sejak dekade 1990-an, solidaritas antarpendinguduk desa yang diikat oleh identitas yang berakar pada lokalitas, memudar dan digantikan oleh identitas yang mengatasi batas-batas geografis administratif. Tak ada gotong royong penduduk desa karena desa itu sendiri. Hubungan bantumembantu yang tersisa dari ikatan

lokalitas secara terbatas hanya berlaku pada tingkat lingkungan kediaman yang hanya meliputi lima hingga sepuluh rumah. Pengelompokan masyarakat yang bermakna bagi penduduk terbentuk dengan energi yang berasal dari identitas dan jaringan supradesa. Ikatan-ikatan berdasarkan lapisan sosial ekonomi tidak terbentuk.

Lembaga Pemerintahan Desa cenderung tidak lagi berperan penting dalam kehidupan masyarakat selain untuk urusan administratif dan penarikan pajak bumi dan bangunan. Pemerintah desa tidak lagi mampu menjadi penggalang solidaritas lokal penduduk. Akhirnya, desa sebagai satuan sosial-ekonomi tidak lagi mampu menampung kebutuhan penduduk memperoleh nafkah. Migrasi keluar yang tinggi karena alasan ekonomi menunjukkan kenyataan ini.

Orde Baru telah menghancurkan ikatan patronase lokal antara orang kaya dan tetangganya yang miskin. Kebijakan-kebijakan pedesaan Orde Baru adalah membangun struktur patronase antara negara dan elite-elite desa yang kaya (bdk. Caderroth 2001: 219). Hal serupa ditemukan juga oleh Breman dan Wiradi (2004). Keduanya menemukan banyak gejala yang memperlihatkan tiadanya ikatan mo-

ral dalam semangat kebersamaan dalam kehidupan pedesaan. Hubungan sosial sudah sangat kontraktual dan kepedulian golongan kaya terhadap mereka yang miskin pun ditunjukkan dengan kalimat "itu tugas pemerintah" (Breman dan Wiradi 2004: 208—10). Secara tajam, dalam kajian tentang dinamika sosio-ekonomi di Cirebon Timur dan Subang Utara tersebut, Breman dan Wiradi (2004:28) menyatakan "mekanisme jaminan sosial, yang katanya merupakan lembaga yang khas untuk pedesaan Jawa di masa kolonial, tidak lagi kelihatan di mana pun." Temuan-temuan ini tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Dompus meskipun hubungan membantu memang tidak hilang sepenuhnya. Penduduk desa di situs-situs penelitian ini masih sering mengungkapkan adanya kebiasaan membantu tetangga dan kerabat yang kesulitan atau ketika menghadapi upacara tertentu—seperti pernikahan—yang membutuhkan dana lebih. Ini seperti temuan Antlöv (1999:198) baru-baru ini yang menemukan bahwa komunitas moral yang berdasarkan keintiman dan keterbiban sosial bagaimanapun masih hidup di desa tempatnya meneliti di Jawa Barat. Namun, seperti halnya juga Antlöv, sedemikian jauh ideologi distributif ini lebih merupakan pemoles, sedangkan di balik itu pada dasar-

nya pernyataan-pernyataan tentang adanya persamaan ditolak sama sekali.

Sementara itu, patronase jenis baru muncul. Negara, melalui dinas-dinas pemerintahnya, berhubungan erat dengan elite desa seperti kepala desa, haji kaya yang punya banyak tanah, dan insinyur yang sedang berjuang membangun bangsa sebagai tenaga penyuluh. Hubungannya tidak sekadar administratif, tetapi juga ekonomi dan politik. Bantuan-bantuan pemerintah asing selalu melewati tangan para elite. Kerja sama yang harmonis antara "Bapak" dan "anak" seperti inilah yang memungkinkan "anak" tidak perlu mengembalikan pinjaman-pinjaman yang disediakan pemerintah untuk petani. Hubungan sejenis terjadi juga antara elite LSM bentukan lembaga donor luar negeri dengan para pendamping masyarakat yang ada di desa-desa. Pendamping masyarakat selalu dari kalangan orang-orang yang mempunyai kepercayaan diri yang besar: orang kaya dan orang pintar lulusan perguruan tinggi. Bahkan, ada pendamping masyarakat dari sebuah LSM terkenal berperan juga sebagai rentenir. Dampak dari pudarnya patronase lokal dan terbentuknya patronase antara elit desa dengan pemerintah adalah terkikisnya solidaritas antarpenduduk. Keterikatan ang-

gota kelompok pada kelompoknya tidak lebih dari keterikatan pada kepentingan untuk memperoleh bagian dari keuntungan proyek: pinjaman, bantuan, dan lain-lain. Para pembina kelompok pun hanya datang di kala dana masih tersedia.

Selain itu terjadi juga polarisasi antarwarga masyarakat ke dalam dua kutub kepentingan: golongan elite desa yang menanggung keuntungan dari keprihatinan pemerintah dan lembaga donor atas kemiskinan orang desa, dan golongan miskin yang dimanfaatkan tanda tangan dan daftar nama-namanya sebagai bagian dari proposal permohonan bantuan oleh golongan pertama. Oleh karena itu, ada kasus yang di situ orang-orang miskin menolak turut campurnya orang luar dan orang berpendidikan. Mereka sadar telah dimanfaatkan. Kepercayaan sudah tidak lagi berperan secara memadai dan merata dalam hubungan sosial yang sehat.

Penutup

Hasil amatan terhadap kehidupan pedesaan menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang memaksa rawan pangan tetap mendekam di antara sebagian besar orang miskin pedesaan Dompu. Kita tidak dapat mungkir

bahwa alam Dompu yang kering menyumbang saham dalam produksi kerawanan pangan. Hanya perlu dua sampai tiga kali gagal panen dalam kemarau panjang untuk kemunculan bahaya kelaparan. Kita yang mengkaji persoalan besar ini tentu tidak boleh menutup mata keragaman virus yang membuat kerawanan pangan betah tinggal di desa-desa. Akan tetapi, secara khusus kita perlu insaf bahwa faktor-faktor utama yang melanggengkan hal ini berada di relung dunia sosial. Andai alam menyimpan faktor utama, tidak akan ada seorang pun yang dapat makmur di pedesaan Dompu.

Ketergantungan petani miskin pada uang tunai dari para tengkulak dan rentenir sudah tinggi di beberapa desa yang diteliti. Kenyataan ini melanggengkan hubungan timpang antara yang kaya dan yang miskin. Kerawanan pangan terutama menimpa penduduk miskin, karena bagi yang mampu, bahan pangan dari luar daerah dapat didatangkan selama pintu ekonomi desa terbuka lebar.

Gambaran empiris di atas juga menunjukkan bahwa orang desa dan petani di Dompu tidak seragam baik hubungan sosial maupun situasi alam yang melingkupi. Keanekaragaman tidak hanya karena kepemilikan ta-

nah—yang sayang sekali tidak tersedia datanya secara lengkap—tetapi juga anutan politik, gender, kepentingan ekonomi, serta orientasi terhadap keberadaan lembaga-lembaga yang dibentuk orang luar. Semua hal tersebut di atas, langsung maupun

tidak, akan punya andil dalam upaya penanganan kerawanan pangan di Kabupaten Dompu. Semoga, setiap kita bisa menyumbang apa yang bisa kita berikan, dan setiap orang mendapatkan apa yang dibutuhkannya.



Daftar Pustaka

- Adam, A. W. 2005. "Sejarah Politik dan Politik Sejarah", dalam W.H. Frederick dan S. Soeroto (peny.). *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES. hlm. xi—xxxiii.
- Antlöv, H. 1999. "The New Rich and Cultural Tensions in Rural Indonesia", dalam M. Pinches (ed.). *Culture and Prevedge in Capitalist Asia*. London/New York: Routledge. hlm. 188—207.
- _____. 2001. "Elite Desa dan Orde Baru", dalam H. Antlöv dan S. Cederroth (peny.). *Kepemimpinan Jawa: perintah halus, pemerintahan otoriter*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 100—132.
- Booth, A. 1988. "Agricultural Development in Indonesia". *Asian Studies Association of Australia: Southeast Asia Publication Series No 16*.
- Breman, J., dan G. Wiradi. 2004. *Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa: studi kasus dinamika sosio-ekonomi di dua desa menjelang akhir abad ke-20*. Jakarta: LP3ES dan KITLV-Jakarta.
- Breman, J. 1986. *Penguasaan Tanah dan tenaga Kerja: Jawa di Masa Kolonial*. Jakarta:LP3ES.

- Caderroth, S. 2001. "Modernisasi Orde Baru dan Islam: aparat desa dan tokoh agama", dalam H. Antlöv dan S. Cederroth (peny.). *Kepemimpinan Jawa: perintah halus, pemerintahan otoriter*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 188—222.
- Chamber, R. 1983. *Pembangunan Desa: mulai dari belakang*. Jakarta: LP3ES.
- _____. 1988. "Metode-metode Pintas dalam Mengumpulkan Informasi Sosial untuk Proyek-proyek Pembangunan Pedesaan", dalam M.M. Cernea (peny.). *Mengutamakan Manusia di dalam Pembangunan: variabel-variabel sosiologi di dalam pembangunan pedesaan*. Jakarta: UI Press. hlm. 511—529.
- Chambert-Loir, H. 1985. *Syair Kerajaan Bima*. Jakarta: Lembaga Penelitian Prancis untuk Timur Jauh.
- Geertz, C. 1963. *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Bhatara Karya Aksara.
- Giddens, A. 1986. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: suatu analisis karya-tulis Marx, Durkheim, dan Max Weber*. Jakarta: UI Press.
- Kuhnen, F. 1993. "Struktur Pertanian". *Sosiologi Pertanian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lombard, D. 2000. *Nusa Jawa Silang Budaya Jilid III: warisan kerajaan-kerajaan konsentris*. Jakarta: Gramedia.
- Marzali, Amri. 2003. *Strategi Peisan Cikalong dalam Menghadapi Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miles, M. B., dan A. M. Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: UI Press.
- Napiri, Y. 2002. Evaluasi Program Sustainable Livelihood OXFAM GB di Beberapa LSM Pendamping Petani di Jawa. Laporan Penelitian AKATIGA. Tidak Diterbitkan.

- Parimarta, I G. 2002. *Perdagangan dan Politik Di Nusa Tenggara 1815-1915*. Jakarta: Penerbit Djambatan dan KITLV-Jakarta.
- Soetomo, G. 1997. *Kekalahan Manusia Petani: dimensi manusia dalam pembangunan pertanian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wahono, F. 1999. "Revolusi Hijau: Dari Perangkap Involusi ke Perangkap Globalisasi". *Jurnal Wacana* No IV. Yogyakarta: INSIST Press.
- Wolf, E. R. 1985. *Petani: suatu tinjauan antropologis*. Jakarta: Rajawali Press untuk YIIS.
- _____. 1990. *Europe and The People Without History*. Berkeley: University of California Press.

